



Soal Rencana Utang Rp 116 M untuk Tangani Sampah dan Jalan

Sekprov: Ini Langkah Darurat untuk 2024

JOGJA - Rencana Pemprov DIJ utang Rp 116 miliar, Rp 100 miliar di antaranya untuk mengatasi masalah sampah, sifatnya baru pengajuan dan tengah

dalam tahap diskusi dengan Komisi C DPRD DIJ. Pertimbangan pengajuan, karena banyaknya pengeluaran yang bertumpuk di tahun sama ■

► Baca *Sekprov...* Hal 11

RENCANA PENGAJUAN PINJAMAN KEPADA BANK BPD DIJ

Total pinjaman yang diajukan:
Rp 116 miliar

- **Rp 100 miliar** akan digunakan untuk membeli teknologi pengolahan sampah,
- **Rp 16 miliar** dipakai membangun infrastruktur jalan.

DARURAT SAMPAH

GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Sekprov: Ini Langkah Darurat untuk 2024

Sambungan dari hal 1

"Tentunya jika mendapat persetujuan. Ya, ini baru pengajuan perencanaan yang sedang didiskusikan. Tentu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DIJ, makanya kemarin dibahas di Komisi C," kata Sekprov DIJ Beny Suharsono kemarin (21/8). Rencana pengajuan pinjaman kepada Bank BPD DIJ.

Disebutkan, total pinjaman yang diajukan Rp 116 miliar. Rinciannya sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk membeli teknologi pengolahan sampah, sisanya Rp 16 miliar dipakai membangun infrastruktur jalan. Antara lain, memperbaiki Jalan Godean-Ngapak dan Jalan Kwangon-Tempel di Sleman.

"Rencana Rp 116 miliar itu untuk sampah dan jalan yang harus kita lakukan peningkatan dan perbaikan. Itu sudah menumpuk sekian tahun yang tidak pernah terealisasi. Sekarang bertumpuk semuanya, sampah numpuk, jalan numpuk, kemiskinan numpuk," tambah Beny.

Mantan kepala Bappeda DIJ itu menyebut, pengeluaran pada tahun 2024 bertumpuk. Sehingga ini yang menjadi alasan untuk memutuskan pengajuan utang

dana ke bank. Meliputi adanya persentase pengeluaran untuk pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan masih memiliki kewajiban penyertaan modal yang perdananya numpuk terakumulasi di 2024.

Terlebih, kapasitas fiskal daerah DIJ terbilang rendah. Dan banyak yang harus diak-selerasi. "Sehingga celahnya kan tinggal sedikit. Kalau itu bisa dilakukan untuk infrastruktur, masih memungkinkan dan itu dibolehkan. Regulasinya mungkin, asal sesuai dengan kemampuan fiskal kita," jelasnya.

Pinjaman itu jika dapat disetujui, rencananya akan dicitil selama tiga tahun. Pemprov juga akan menjajaki peluang pembiayaan lain seperti penggunaan dana keistimewaan (danais). Boleh tidaknya penggunaan danais untuk penanganan sampah.

"Kan harus diajukan ke pusat. Sehingga alternatif pembiayaan harus kita lakukan supaya tidak stagnan. Kalau kita berhenti, ya tidak bakal teratasi karena fiskalnya sangat rendah," tambahnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIJ Wiyos Santoso mengatakan, terkait pinjaman daerah menurut peraturan pemerintah dimungkinkan

adanya pembiayaan. Hanya, dapat melakukan pinjaman untuk infrastruktur dan tidak boleh untuk penggunaan di luar itu. "Kemarin ada kasus sampah. Itu kan juga segera harus kita tangani. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," katanya.

Dia menyebut, muncul untuk pengolahan sampah ada sekitar Rp 100 miliar lebih untuk TPST Piyungan. Mekanismenya, pemprov mengajukan bersamaan dengan kelengkapan yang lain sesuai rekomendasi PP-nya itu. Keputusan ini diklaim sebagai langkah darurat.

"Nanti kalau KPBU beda lagi, KPBU bukan 2024, tidak bisa. Ini termasuk kedaruratan kita tahun 2024. Kalau KPBU kemarin masih *market sounding* seperti apa, investor akan lapangan, tahun 2024 belum tentu ada. Kita butuh kesegeraan ini," tandasnya.

Pinjaman direncanakan akan diselesaikan selama tiga tahun dengan asumsi angsuran per tahun sekitar Rp 30 miliar. "Kalau sekali kita bebankan ke APBD berat sekali. Artinya bisa kita bagi dalam tiga tahun, tidak begitu memberatkan. Kami harapkan suku bunga lebih rendah," tambahnya. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005